

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang memanfaatkan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum, serta Jumlah Angkatan Kerja terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak memberikan kontribusi secara langsung terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jombang. Meskipun PDRB Kabupaten Jombang terus meningkat, hal ini tidak berdampak signifikan terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap karena pertumbuhan ekonomi tersebut lebih banyak didorong oleh sektor industri pengolahan dan perdagangan yang semakin berorientasi pada teknologi dan modal, bukan pada penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, mayoritas tenaga kerja yang terserap justru berada di sektor informal. Selain itu ketidaksesuaian antara keterampilan angkatan kerja lokal dengan kebutuhan sektor modern menyebabkan pertumbuhan PDRB tidak mampu mendorong penciptaan lapangan kerja secara optimal di Kabupaten Jombang.
2. Upah Minimum Kabupaten tidak memberikan kontribusi secara langsung terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jombang. Meskipun Upah Minimum Kabupaten Jombang terus meningkat dari tahun ke tahun hal ini tidak berdampak signifikan terhadap jumlah

tenaga kerja yang terserap karena sebagian besar pekerjaan di Kabupaten Jombang berada di sektor informal seperti pertanian, perdagangan tradisional, dan industri rumahan yang tidak membayar pekerjanya sesuai standar Upah Minimum Kabupaten. Akibatnya, perubahan kebijakan Upah minimum dari tahun ke tahun tidak memberikan dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jombang.

3. Jumlah Angkatan Kerja memberikan kontribusi secara langsung dan dominan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jombang. Seiring dengan terus meningkatnya jumlah angkatan kerja penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jombang juga mengalami peningkatan yang searah. Hal ini terjadi karena sebagian besar lapangan kerja di Kabupaten Jombang berada di sektor informal seperti pertanian, perdagangan, dan industri rumahan yang memiliki kapasitas elastis dalam menyerap setiap penambahan angkatan kerja tanpa mensyaratkan kualifikasi formal yang ketat.

5.2 Saran

5.2.1 Saran bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penelitian selanjutnya. Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut.

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel independen lain yang secara teoritis berpotensi memengaruhi penyerapan tenaga kerja

di Kabupaten Jombang, seperti variabel investasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan jumlah unit usaha UMKM. Penambahan variabel-variabel tersebut diharapkan dapat menghasilkan model yang lebih komprehensif dalam menjelaskan fenomena penyerapan tenaga kerja di tingkat daerah.

2. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan data panel yang mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur untuk memperoleh hasil analisis yang lebih representatif dan memiliki generalisasi yang lebih luas. Analisis data panel memungkinkan peneliti untuk mengontrol heterogenitas antar wilayah serta mengidentifikasi pengaruh variabel independen secara lebih akurat.

5.2.2 Saran bagi Pemerintah Kabupaten Jombang

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam upaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja secara lebih efektif dan berkelanjutan:

1. mengingat pertumbuhan PDRB tidak terbukti mendorong penyerapan tenaga kerja secara signifikan, Pemerintah Kabupaten Jombang perlu mengubah orientasi pembangunan ekonomi dari sekadar mengejar pertumbuhan output menuju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Hal ini dapat dilakukan dengan memprioritaskan investasi pada sektor-sektor padat karya seperti industri pengolahan berbasis pertanian, kerajinan, dan pariwisata lokal yang memiliki potensi menciptakan

lapangan kerja bagi masyarakat luas. Selain itu, pemerintah perlu mendorong masuknya investasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan modal tetapi juga memiliki komitmen terhadap penyerapan tenaga kerja lokal melalui persyaratan dalam pemberian izin usaha dan insentif investasi.

2. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan relevansi sumber daya manusia angkatan kerja di Kabupaten Jombang agar mampu mengisi lapangan kerja yang tercipta dari pertumbuhan ekonomi. Program pelatihan vokasional dan sertifikasi kompetensi perlu diperluas jangkauannya dan diselaraskan dengan kebutuhan riil sektor industri dan jasa yang berkembang di daerah. Kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha dalam merancang kurikulum pelatihan yang berbasis kebutuhan pasar kerja perlu diperkuat, sehingga kesenjangan antara keterampilan angkatan kerja dan kebutuhan industri dapat diminimalkan.
3. Pemerintah perlu merancang kebijakan yang secara spesifik mendukung formalisasi dan penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai penyerap tenaga kerja terbesar. Kemudahan akses permodalan, pendampingan usaha, fasilitas pemasaran digital, serta perlindungan sosial bagi pekerja informal perlu menjadi prioritas dalam kebijakan ketenagakerjaan daerah. Hal ini penting agar angkatan kerja yang tidak dapat terserap pada sektor formal tetap memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

4. mengingat Jumlah Angkatan Kerja terus meningkat setiap tahunnya, pemerintah perlu mengantisipasi tekanan ini dengan memperluas ruang penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kawasan industri, peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi, dan promosi potensi daerah kepada investor luar. Di samping itu, pemerintah juga perlu memfasilitasi mobilitas tenaga kerja yang belum terserap di Kabupaten Jombang ke daerah-daerah lain yang memiliki kebutuhan tenaga kerja lebih besar, melalui program penempatan kerja antardaerah yang terorganisir dengan baik.
5. Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan penetapan upah minimum agar lebih selaras dengan kondisi daya saing usaha lokal, khususnya usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jombang. Penetapan upah minimum yang terlalu agresif tanpa diimbangi peningkatan produktivitas tenaga kerja berisiko mendorong pengusaha untuk mengefisienkan penggunaan tenaga kerja, sementara penetapan yang terlalu rendah berisiko tidak mampu menjamin kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, diperlukan dialog tripartit yang intensif antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam menentukan besaran upah minimum yang berkeadilan dan mendukung iklim ketenagakerjaan yang kondusif.

